

SISTEM PEMILIHAN KETUA DPD PDI PERJUANGAN JAWA TENGAH

PERIODE 2013-2015

Ferry Priyono Putro, Drs Susilo Utomo, M.Si, Dra Fitriyah MA
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstraksi

Partai politik merupakan salah satu agen dalam sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi. Keberhasilan dari sebuah partai untuk menjalankan sistem demokrasi dapat kita lihat melalui fungsi rekrutmen politiknya. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar di Jawa Tengah yang memiliki basis massa banyak. Kekosongan jabatan yang terjadi pada DPD PDI Perjuangan harus secepatnya diisi kembali dengan cara rekrutment elit politik untuk mengganti Ketua baru.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dimana disini nantinya akan menjelaskan suatu objek, fenomena, atau latar belakang sosial sasaran penelitian terejawantahkan dalam tulisan naratif. Lokasi penelitian di Kota Semarang dimana DPD PDI Perjuangan berada. Kekosongan jabatan pada posisi ketua DPD PDI Perjuangan menjadi sebuah masalah yang cukup menarik untuk diteliti, kekosongan yang terjadi pada saat mendekati pemilihan Gubernur Jawa Tengah memunculkan pola-pola rekrutmen elit politik serta sistem yang digunakan dalam pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan untuk mengisi jabatan lowong.

Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menggantikan Ketua DPD, baik untuk periode lima tahunan serta pengisian jabatan lowong seperti yang terjadi pada tahun 2013 lalu. Kemudian disini peneliti juga menjawab bagaimana sistem yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan Ketua DPD PDI Perjuangan untuk periode lima tahunan dan pengisian jabatan lowong.

Kata kunci:

Partai politik, pola rekrutmen, dan sistem pemilihan

PENDAHULUAN

Hubungan yang terjalin antara warga negara dengan pemerintah selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan keduanya dapat tergambarkan dalam sebuah icon yang disebut

dengan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu gambaran mengenai perkembangan suatu organisasi disuatu daerah.

Demokrasi sebagai salah satu aspek penting yang berkaitan antara pemerintahan dengan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik pada suatu negara. Disini artinya, akan ada sistem politik nasional yang terdapat sub sistem politik daerah yang masuk dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Terdapat dua jenis yang merujuk pada hirarki tersebut, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah¹.

Fase demokrasi langsung disini merupakan era baru dari reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapatkan pengakuan dari dunia karena keberhasilannya. Kita ketahui bersama bahwa rekrutmen elit politik seperti halnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan hingga pemilihan ketua dari partai politik dilakukan dengan cara terbuka dan mewakili aspirasi dari rakyat.

Ketertarikan penulis terhadap fenomena politik yang terjadi di internal partai PDI-Pejuangan adalah ketika terjadi kekosongan jabatan pada posisi ketua

¹ Rudini, H. 1994. Atas Nama Demokrasi Indonesia, Hal.6-7

DPD PDI-Perjuangan yang dikarenakan terjeratnya ketua H. Murdoko karena kasus korupsi APBD Kendal tahun 2010 lalu.

Kekosongan dari posisi yang ditinggalkan oleh ketua DPD PDI-Perjuangan H.Murdoko yang diduga melakukan tindakan korupsi menyebabkan tugas yang diemban oleh ketua DPD diserahkan pada Pelaksana Tugas (Plt) M.Prakosa². Kekosongan jabatan ini tidak boleh terlalu lama terjadi, DPD PDI-Perjuangan harus segera memilih ketua definitif untuk menggantikan posisi dari H.Murdoko.

Pemilihan ketua DPD PDI-Perjuangan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh ketua yang lama telah memunculkan setidaknya empat nama. Empat nama calon ketua PDI-Perjuangan Jawa Tengah itu adalah Heru Sudjakmoko (Wakil Gubernur Jawa Tengah), Nuniek Sriyuningsih (Wakil Ketua PDI-Perjuangan Jawa Tengah dan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Jawa Tengah), Singgih Santoso (Bupati Magelang) dan FX Hadi Rudyantmo (Walikota Solo)³.

Dalam hakikatnya terdapat dua mekanisme dalam pemilihan ketua dari PDI-Perjuangan yaitu mekanisme voting dan aklamasi. Namun sepertinya pemilihan ketua DPD PDI-Perjuangan periode 2013-2015 ini akan lebih mengacu pada mekanisme aklamasi. Bila kita mengacu pada konsep negara yang demokrasi pastinya suatu pemilihan ketua juga pasti akan dilaksanakan dengan cara pemilihan, yang dipilih langsung oleh para anggota dari partai politik dengan tidak ada keterpaksaan dari pihak calon ketua DPD PDI-Perjuangan.

² <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/20/176344/PDIP-Jateng-Segera-Pilih-Ketua-Definitif> diakses pada tanggal 7 Desember 2013

³ Tempo.co, diakses pada tanggal 7 Desember 2013

Terpilihnya Heru Sudjakmoko (Wakil Gubernur Jawa Tengah) sebagai ketua definitif DPD PDI-Perjuangan yang baru menunjukkan bahwa kewenangan berada sepenuhnya di tangan DPP PDI-Perjuangan. Mekanisme terpilihnya Heru sebagai ketua definitif juga menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme pemilihan yang dilakukan untuk memilih ketua kewenangan juga berada di tangan pusat atau dalam hal ini adalah DPP PDI-Perjuangan.

PEMBAHASAN

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena melalui proses rekrutmen politik ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karenanya, tercapai tidaknya suatu sistem politik yang baik akan bergantung pada kualitas dari rekrutmen politik ini. Kehadiran suatu partai politik dapat dari kemampuan partai tersebut melakukan fungsinya. Salah satu fungsi yang paling penting yang dimiliki partai politik adalah fungsi mengenai rekrutmen politik.

Fungsi rekrutment erat kaitannya dengan masalah penyeleksian kepemimpinan, baik itu kepemimpinan skala internal maupun skala yang lebih luas yaitu nasional. Setiap partai tentunya perlu memiliki anggota-anggota dan juga kader-kader yang besar dan kuat untuk mengembangkan diri.

Secara umum rekrutmen dapat berarti sebuah cara untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Dalam pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terdapat dua pola rekrutmen seperti apa yang dijabarkan oleh narasumber yaitu pola terbuka dan pola tertutup. Pola terbuka digunakan pada saat mekanisme lima tahunan dilaksanakan yaitu dengan proses rapat-rapat yang dijalankan mulai dari tingkatan bawah partai hingga tingkatan paling atas partai tersebut.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan lima tahunan ini terdapat dalam AD/ART partai ini. Apabila terjadi kekosongan pada posisi ketua maka segera akan dilakukan mekanisme pemilihan dengan cara yang kedua yaitu dengan pola tertutup yang dilaksanakan dengan cara penunjukan secara langsung oleh elit PDI Perjuangan.

Penunjukan secara langsung ini juga memiliki dasar hukum yang kuat juga, menurut pernyataan narasumber dasar hukum yang melandasi pemilihan jabatan kosong ini adalah SK No 027, namun SK ini tidak memungkinkan untuk dipublikasikan karena pihak partai khawatir apabila nantinya sampai ketangan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan penunjukan secara langsung ini akhirnya pada akhir tahun 2013 yang lalu terpilihlah Heru sebagai ketua definitif DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Heru mengaku bahwa terpilihnya dirinya merupakan keputusan langsung dari Ibu Megawati yang menunjuk langsung beliau untuk menjadi ketua DPD.

Dari penjelasan mengenai pola rekrutment ketua DPD PDI Perjuangan juga dapat terlihat sistem apa yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan proses pemilihan ketua DPD.

Dalam sebuah setiap pencapaian tujuan dibutuhkan adanya suatu kesatuan dari seperangkat struktur yang biasa disebut dengan sistem. Dalam kaitannya dengan pemilihan ketua DPD disini berarti harus ada kesatuan yang terjadi antara struktur yang ada di dalam internal partai tersebut.

Setelah kita mengetahui pola-pola yang terjadi pada pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dapat dilihat partai ini menggunakan sistem pemilihan yang bisa disebut dengan sistem demokrasi (konversi), dan menggunakan sistem kepartaian (otoriter).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Agustina bahwasanya pemilihan ketua dengan mekanisme lima tahunan menggunakan sistem yang bisa disebut dengan demokrasi, partai menggunakan cara-cara yaitu dengan rapat-rapat yang diadakan untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang dari seluruh anggota partai.

Tidak dipungiri PDI Perjuangan merupakan sebuah partai yang dapat dibilang besar untuk wilayah di Jawa Tengah. Jadi tidak mengherankan apabila banyak aspirasi-aspirasi yang muncul pada saat rapat-rapat diadakan di seluruh tingkatan partai berlambang moncong putih ini.

Sistem demokrasi ini dapat ditunjukkan dengan mekanisme yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan periode 2010-2015 lalu. Pemilihan dilakukan dengan cara rapat-rapat yang dilakukan partai, mulai dari tingkat bawah partai hingga tingkatan paling atas partai.

Meski demikian, Agustina juga tidak menampik bahwasanya campura tangan dari pihak DPP memang selalu ada didalam keputusan yang akan diambil

oleh pihak DPD. Seluruh keputusan yang akan dibuat oleh DPD harus dikoordinasikan kepada pihak DPP dan harus memperoleh persetujuan dari Ketua Umum.

“..seluruh dari keputusan yang menyangkut mengenai DPD harus menunggu dari keputusan DPP, karena semua keputusan berada ditangan Ketua Umum, kita pihak DPD hanya siap menerima dan melaksanakan apa yang diputuskan oleh DPP,” jelas Agustina

Walaupun demikian, seluruh narasumber menegaskan bahwasanya sistem pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan dengan metode lima tahunan menggunakan sistem demokrasi (konversi) dikarenakan mau untuk mendengarkan aspirasi dan usulan-usulan dari anggota-anggota partai dibawah DPP serta dibawah DPD.

“dalam sistem pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan pada mekanisme lima tahunan kita menggunakan sistem yang biasa disebut dengan demokrasi, walaupun nantinya keputusan berada di tangan Ketua Umum,” jelas Nuniek

Dengan menggunakan sistem terbuka ini diharapkan akan mendapatkan calon pengganti ketua yang benar-benar layak untuk menjadi ketua. Cara ini memberikan kesempatan bagi seluruh anggota partai untuk memberikan penilaian kepada para calon ketua yang akan menggantikan ketua lama dengan mendengarkan aspirasi dari seluruh anggota.

Dengan demikian cara ini merupakan salah satu cara yang sangat kompetitif karena nantinya seluruh nama-nama yang muncul sebagai calon ketua akan melakukan sebuah uji kelayakan yang dilakukan oleh pihak DPP PDI Perjuangan. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini berfungsi sebagai sarana bagi anggota untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun yang diharapkan dari rekrutment terbuka ini adalah:

- a. Mekanismenya demokratis.
- b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan para anggota akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki bersama.
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Menurut penjelasan dari seluruh narasumber tengah menjelaskan bahwa pada mekanisme lima tahun PDI Perjuangan menggunakan sistem yang disebut dengan sistem demokrasi namun apabila dilihat lebih jauh lagi bahwasanya pada pemilihan ketua DPD periode lima tahunan partai ini lebih menggunakan sistem campuran, karena setelah melakukan rapat-rapat yang diadakan tetap saja hasil keputusan berada di tangan Ketua Umum dari PDI Perjuangan.

Tidak berbeda jauh dari mekanisme lima tahunan, pada pemilihan ketua definitif untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi, PDI Perjuangan menggunakan sistem yang bisa disebut otoriter atau pemilihan secara langsung oleh elit partai.

Sistem otoriter ini dapat terlihat dari pola pemilihan ketua definitif yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, mekanisme yang dilakukan adalah penunjukan secara langsung. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Heru, bahwasanya beliau terpilih menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dengan cara ditunjuk langsung oleh Ketua Umum.

“saya terpilih menjadi ketua DPD juga tidak menyangka, karena saya pada saat itu hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, karena telah memberi kepercayaan lebih kepada saya, namun singkat cerita saya kemudian ditunjuk kembali oleh beliau untuk menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,” jelas Heru

Untuk pemilihan ketua definitif ini memang pihak dari DPD lebih menginginkan untuk ditunjuk secara langsung oleh pihak DPP, karena ingin memfokuskan diri pada pemilihan Gubernur pada tahun 2013 lalu serta fokus pada pemilihan legislatif pada April 2014 yang lalu.

Selain daripada itu, terpilihnya Heru sebagai ketua DPD sepertinya memang sudah diperkirakan, walaupun muncul beberapa nama yang akan menjadi calon ketua DPD pada saat itu. Namun lebih menarik ketika Heru sendiri tidak mengetahui bahwa ada beberapa nama calon untuk menjadi bakal ketua definitif DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

“..lhoohh saya malah tidak mengetahuinya dik, yang saya tahu ya saya langsung ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum ketika saya berkunjung ke kediaman beliau, lhaa emang nama-nama itu siapa saja?,” kata Heru

Hal ini menunjukkan bahwa mungkin benar pihak DPP ingin mengamankan diri untuk menghadapi pemilu legislatif bulan April kemarin karena apabila dilakukan dengan mekanisme lima tahunan dikhawatirkan akan memunculkan resistensi politik, karena nama-nama yang akan dicalonkan ada beberapa mungkin yang akan menjadi calon legislatif lagi.

“..pihak DPD memang menginginkan untuk dipilih secara langsung oleh DPP, karena kita juga harus memikirkan gejala politik Jawa Tengah, dan kita juga tidak mau adanya resistensi politik karena Jawa Tengah merupakan kandang kita sendiri,” jelas Agustina

Alasan demi alasan yang dijelaskan oleh narasumber sudah menjabarkan bahwasanya PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang masih menjunjung tinggi keputusan dari elit politik PDI Perjuangan. Selain itu dari dua pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan lebih mengacu pada sistem otoriter (kepartaian) dikarenakan setiap keputusan yang diambil harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa pola dan sistem yang digunakan oleh PDI Perjuangan saling berkesinambungan. Pola dan sistem yang digunakan dalam pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dilakukan oleh pihak DPP juga telah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Jawa Tengah benar-benar menjadi situasi politik Jateng yang notabene adalah kandang dari PDI Perjuangan itu sendiri.

Dari dua sistem yang diungkapkan oleh para narasumber dapat terlihat bahwa seluruh keputusan yang menyangkut DPD PDI Perjuangan berada ditangan DPP yang dalam hal ini adalah berada ditangan Ketua Umum dari partai belambang moncong putih ini.

Jadi, untuk pemilihan ketua DPD untuk periode lima tahunan maupun pengisian jabatan lowong, pihak DPD sebenarnya lebih menunggu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak DPP atau pusat , karena pihak DPD hanya bisa mengusulkan nama-nama yang akan menjadi bakal ketua definitif nanti.

Cara pemilihan seperti ini memang diinginkan oleh pihak DPD seperti yang telah diungkapkan oleh Agustina tadi, karena dalam pemilihan ketua definitif DPD, partai menginginkan tidak terpecah fokusnya dalam menghadapi

event besar hanya karena proses pemilihan ketua definitif seperti kemarin. Diharapkan dengan pemilihan yang dilakukan oleh pihak DPP, nantinya akan menemukan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan kosong dan akan menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan dari pihak DPP serta pihak DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai sistem pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah periode 2013-2015 ditarik kesimpulan bahwa pola rekrutment yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Jawa Tengah cenderung melakukan pola tertutup karena seluruh keputusan untuk terpilihnya ketua DPD semua berada ditangan Ketua Umum. Selain itu sistem yang digunakan juga sama yaitu sistem kepartaian atau otoriter yang lebih mengutamakan atau mengacu pada keputusan elit politik saja.

Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik secara prosedural maupun substansial hendaknya partai-partai politik menjadikan ini semua sebagai pembelajaran untuk bersaing secara sportif dalam dunia perpolitikan. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran politik dengan adanya persaingan yang ketat dan sehat pada internal partai. Guna menciptakan pemimpin-pemimpin yang berlandaskan pada ideologi dan platform partai. Sehingga nantinya akan memunculkan ketua-ketua yang bukan hanya merupakan kehendak elit partai namun juga merupakan kehendak dari seluruh anggota partai politik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo.2007.*Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Almond,Gabriel A dan Sidney Verba.1984.*Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*.Jakarta: Bina Aksara
- Budiardjo,Miriam.1998.*Partisipasi dan Partai Politik*.Jakarta: Yayasan Obor
- _____.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cangara,Hafied.2009.*Komunikasi Politik:Konsep,Teori, dan Strategi*.Jakarta: Rajawali Pers
- Diamond,Larry.1994.*Revolusi Demokrasi Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara sedang Berkembang*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Echol,John dan Hasan Syadzili.1996.*Kamus Inggris-Indonesia*.Jakarta: Gramedia
- Firmanzah.2011.*Mengelola Partai Politik*.Jakarta :Yayasan Pustaka Obor
- _____.2012.*Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Gaffar,Afan.1999.*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gatara,Sahid.2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*.Bandung: Pustaka Setia
- Ghony,M Djunaidi & Fauzan Almanshur.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jakarta : Ar-Ruzz Media

Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Andi

H, Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi*. Jakarta: Cv Rajawali.

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Majuy

Marbun, BN. 2004. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Cv Rajawali

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar

Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Straus, Ansen dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surbakti, Ramlan. 1995. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana

Syafei, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka RekaCipta

Undang-undang Pemilu dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Mediatama

Yahya, Imam. 2010. *Gagasan Fiqih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*. Semarang: Walisongo Press

Surat Kabar:

Yohan Wahyu dan Ignatius Kristanto, 12 Maret 2009, Arena Pertarungan Nasionalis, Harian Kompas

Skripsi dan Thesis

Budi Riyanto, 2009, Pelembagaan Politik PDI-Perjuangan Jateng, *Tesis*, hal 82

Aggun Puspitoningrum, Keterwakilan Perempuan dalam Politik, *Skripsi*, 2007 hal 75-76

Internet:

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/20/176344/PDIP>

[-Jateng-Segera-Pilih-Ketua-Definitif](#) diakses pada tanggal 7 Desember 2013

Tempo.co , diakses pada tanggal 7 Desember 2013

<http://www.antaraneews.com/berita/332797/murdoko-diberhentikan-selaku-ketua-pdi-perjuangan-jateng> diakses pada tanggal 11 Maret 2014

<http://acch.kpk.go.id/murdoko> diakses pada tanggal 11 Maret 2014

<http://www.solopos.com/2010/03/08/jokowi-jabat-wakil-ketua-dpd-pdip-jateng-16140>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014, pukul 19.00 WIB

<http://www.solopos.com/2010/03/08/jokowi-jabat-wakil-ketua-dpd-pdip-jateng-16140>, dikutip pada tanggal 14 Mei 2014 , pukul 19.30 WIB

<http://www.jpnn.com/read/2014/03/05/220071/Sesama-Kader-PDIP-Nyaris-Adu-Jotos->, diakses pada tanggal 14 Mei 2014, pukul 19.45 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/20/176344/PDIP>

[-Jateng-Segera-Pilih-Ketua-Definitif](#) diakses pada tanggal 7 Desember 2013

Tempo.co , diakses pada tanggal 7 Desember 2013